

Optimalisasi Peran Media Center Humas Pemerintah Kabupaten Majene Sebagai Media Komunikasi Publik

Dwidya Indah Permatasari

widyaindahps@gmail.com

Universitas Muslim Indonesia

Abd. Majid

abd.majid@umi.ac.id

Universitas Muslim Indonesia

Syamsidar

syamsidar.syamsidar@umi.ac.id

Universitas Muslim Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi peran Media Center Humas Pemerintah Kabupaten Majene sebagai media komunikasi publik, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri atas tujuh pihak, termasuk pengelola Media Center Humas dan masyarakat pengguna layanan tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Media Center telah menjalankan perannya secara cukup optimal, terutama melalui pemanfaatan berbagai platform digital seperti situs web resmi, media sosial, dan layanan pengaduan masyarakat SPAN LAPOR. Media Center berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam menyampaikan informasi strategis dan menampung aspirasi publik. Namun, terdapat sejumlah hambatan dari sisi penerima informasi, seperti rendahnya literasi informasi, ketergantungan pada komunikasi lisan, keterbatasan literasi digital, dan akses media digital yang belum merata di masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara penyedia informasi dan kapasitas masyarakat dalam menerima serta memanfaatkan informasi secara efektif.

Kata kunci: Komunikasi Publik, Media Center, Optimalisasi, Humas Pemerintah

Abstract: This study aims to examine how the Public Relations Media Center of the Government of Majene Regency optimizes its role as a medium for public communication and to identify the challenges it faces in implementation. The research uses a descriptive method with a qualitative approach. Informants consist of seven individuals, including media center managers and members of the community who use its services. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings show that the media center's role has been fairly optimized through the use of digital platforms such as official websites, social media, and the SPAN LAPOR complaint service. The media center serves as a communication bridge between the government and the public, especially in disseminating strategic information and accommodating public aspirations. However, several obstacles come from the public side, including low information literacy, reliance on oral communication, limited digital literacy, and unequal access to digital platforms. These barriers indicate a gap

between information providers and the public's capacity to receive and utilize information effectively.

Keywords: *Public Communication, Media Center, Optimization, Government Public Relation*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (2022) menunjukkan bahwa 70% masyarakat Indonesia aktif mengakses informasi melalui media digital. Hal ini menuntut pemerintah untuk menjalankan komunikasi publik yang transparan dan efektif guna membangun kepercayaan masyarakat. Komunikasi publik sendiri merupakan proses penyampaian pesan dari pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan memengaruhi opini dan membentuk sikap terhadap suatu isu atau kebijakan (Kriyantono, 2020; Suherman, 2020). Karena bersifat satu arah dan ditujukan kepada khalayak luas yang heterogen, komunikasi publik harus dirancang secara strategis, menggunakan bahasa yang jelas, media yang tepat, serta konten yang sesuai dengan kebutuhan informasi masyarakat (Sarasati & Avicenna, 2021).

Pasal 28F UUD 1945 juga secara tegas menjamin hak warga negara untuk memperoleh dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Untuk menunjang komunikasi publik di tingkat daerah, pemerintah membentuk Media Center Humas sebagai pusat pengelolaan informasi berbasis teknologi. Menurut Bakri et al. (2015) dan Ardianto & Kriyantono (2016), Media Center berperan dalam menyebarluaskan informasi pemerintah sekaligus menampung umpan balik dari masyarakat guna menghindari ambiguitas dan memperkuat kepercayaan publik. Selain itu, humas sebagai bagian dari Media Center memiliki peran penting dalam membangun citra positif lembaga negara melalui komunikasi yang terstruktur dan strategi yang efektif (Cutlip et al., 2016).

Salah satu daerah yang menerapkan model ini adalah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang memiliki kondisi geografis pesisir dan pegunungan. Letak geografis tersebut menimbulkan tantangan dalam distribusi informasi, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Untuk mengatasinya, Media Center Humas Kabupaten Majene berupaya menyampaikan informasi pemerintahan melalui berbagai saluran resmi seperti situs web, media sosial, dan publikasi digital. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai sejumlah kendala seperti rendahnya literasi digital, dominasi komunikasi lisan di masyarakat, dan terbatasnya infrastruktur komunikasi.

Optimalisasi peran Media Center dalam konteks ini menjadi penting. Seperti dikemukakan Siringoringo (2015), optimalisasi bukan hanya soal hasil tertinggi, tetapi bagaimana mencapai solusi terbaik yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik masyarakat. Media Center dituntut untuk adaptif, responsif, dan inklusif agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil. Sejumlah penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Tukan et al. (2024) dan Sari et al. (2022), menunjukkan bahwa keberadaan Media Center di daerah memiliki dampak signifikan terhadap penyebaran informasi dan penguatan komunikasi publik. Namun, hambatan seperti keterbatasan SDM, lemahnya koordinasi internal,

serta kurangnya dukungan teknologi masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi.

Untuk menganalisis fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan dua pendekatan teori utama. Pertama, Teori Komunikasi Publik, yang menjelaskan bagaimana pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi dengan tujuan membentuk opini dan meningkatkan partisipasi publik. Dalam teori ini, beberapa konsep penting diterapkan, seperti Agenda Setting, yang menekankan bagaimana media termasuk Media Center dapat memengaruhi fokus perhatian publik terhadap isu-isu tertentu. Teori Elaboration Likelihood Model (ELM) juga digunakan untuk memahami bagaimana pesan diproses oleh audiens, baik melalui jalur sentral (pemrosesan mendalam) maupun jalur perifer (pengaruh visual atau emosional). Selain itu, Teori Komunikasi Dialogis menegaskan pentingnya komunikasi dua arah dalam membangun kepercayaan publik, sementara Teori Komunikasi Massa relevan dalam menjangkau audiens yang luas. Kedua, Teori Humas Pemerintah, yang membedakan peran humas pemerintah pusat dan daerah, menekankan bahwa tugas utama humas adalah memberikan informasi secara berkala, membangun hubungan dengan media, serta menyampaikan layanan publik secara terbuka dan non-politis.

Dalam konteks daerah seperti Kabupaten Majene, fungsi humas perlu disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, optimalisasi Media Center Humas menjadi krusial untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi peran Media Center Humas Kabupaten Majene dalam penyampaian informasi publik serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan komunikasi publik yang lebih efektif di daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran Media Center Humas Kabupaten Majene dalam komunikasi publik serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara holistik melalui pemahaman terhadap makna, persepsi, dan pengalaman para subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2018), pendekatan kualitatif cocok digunakan untuk mengkaji fenomena sosial dalam bentuk naratif, bukan angka. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari hingga Maret 2025 di Media Center Humas Kabupaten Majene yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto No. 59, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas Media Center tanpa terlibat secara langsung, guna mencatat proses kerja dan strategi komunikasi yang diterapkan. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan tujuh informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling, yaitu empat orang dari internal Media Center dan tiga orang masyarakat pengguna layanan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung seperti laporan kegiatan, materi publikasi, arsip, serta media visual dan audio yang berkaitan dengan aktivitas kehumasan.

Proses analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan, yakni

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data bertujuan untuk menyaring dan memfokuskan data penting yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis untuk mempermudah pemahaman. Kesimpulan ditarik berdasarkan pola dan makna yang ditemukan selama proses analisis dan selanjutnya diverifikasi melalui diskusi dengan informan serta peninjauan ulang data guna menjaga validitas dan keabsahan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Optimalisasi Peran Media Center Humas Kabupaten Majene Sebagai Media Komunikasi Publik

Penelitian ini menemukan bahwa Media Center Humas Kabupaten Majene telah menjalankan peran strategisnya dalam menyampaikan informasi dan membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Optimalisasi ini tampak dari pemanfaatan berbagai platform digital seperti situs web resmi, akun media sosial (Facebook, YouTube), dan sistem layanan pengaduan masyarakat SPAN LAPOR. Melalui kanal-kanal tersebut, berbagai kegiatan dan informasi pemerintahan dipublikasikan secara terbuka, memungkinkan masyarakat mengakses informasi dengan mudah, cepat, dan kapan saja.

Hasil wawancara dengan Samad, Koordinator Peliputan Media Center Humas Kabupaten Majene, mengonfirmasi hal ini. Ia menjelaskan bahwa Media Center telah aktif dalam menyampaikan informasi melalui berbagai media digital. “Media center humas pemerintah sudah aktif, dan itu bisa kami buktikan dengan output yang terlihat di website, di Facebook, YouTube, dan media sosial lainnya. Semua kegiatan yang ada di pemerintah di kabupaten kami publikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat bisa mengakses informasi tersebut dengan mudah,” ungkapnya saat diwawancara pada 26 Februari 2025. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Media Center dalam membangun komunikasi publik yang transparan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Efektivitas penyebaran informasi melalui media sosial juga terlihat dari respons masyarakat. Muh Ilman Adzan, salah satu warga dari Kecamatan Sendana, mengungkapkan bahwa ia kerap mengakses informasi dari media sosial milik pemerintah daerah. “Iye, pernahji. Seringka liat informasi di media sosialnya tentang kegiatan pemerintah kabupaten,” ujarnya saat diwawancara pada 25 Februari 2025. Hal ini menandakan bahwa saluran digital telah menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas dan menjadi sumber informasi yang relevan di era digital saat ini.

Selain menyampaikan informasi satu arah, Media Center Humas juga membuka ruang interaksi dua arah melalui sistem SPAN LAPOR. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan, maupun masukan terhadap layanan pemerintah. Menurut Samad, “Kalau masukan atau keluhan, kami ada sistem SPAN LAPOR. Ini adalah program nasional yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau masukan terkait informasi publik. Misalnya, jika ada masalah dengan pengurusan KTP atau dokumen lainnya, masyarakat bisa langsung melaporkan melalui aplikasi tersebut. Kami akan menerima dan mengelola laporan tersebut untuk diteruskan kepada pihak terkait.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa Media Center tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Tak hanya mengandalkan media digital, Media Center juga memanfaatkan media konvensional seperti radio lokal untuk menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses internet, khususnya di wilayah pesisir dan pegunungan. Siaran radio digunakan tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menyelenggarakan diskusi interaktif yang memungkinkan masyarakat ikut serta menyuarakan pendapat maupun pertanyaan. Pemanfaatan media konvensional ini menjadi bentuk adaptasi terhadap kondisi geografis Majene yang memiliki keterbatasan akses komunikasi digital di beberapa wilayah.

Secara keseluruhan, optimalisasi peran Media Center Humas Kabupaten Majene tercermin dari kemampuannya dalam menggabungkan teknologi informasi dengan pendekatan komunikasi publik yang inklusif. Keaktifan dalam publikasi digital, keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan media konvensional menjadikan Media Center sebagai instrumen penting dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Hasil ini sejalan dengan teori komunikasi publik dan humas pemerintah yang menekankan pentingnya penyampaian informasi yang efektif, dialogis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Hambatan Media Center Humas Kabupaten Majene Sebagai Media Komunikasi Publik

Optimalisasi komunikasi publik tidak hanya ditentukan oleh kinerja institusi penyedia informasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan karakteristik masyarakat sebagai penerima informasi. Di Kabupaten Majene, Media Center Humas Pemerintah telah berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi secara terbuka melalui berbagai kanal, baik digital seperti website, Facebook, dan YouTube, maupun kanal konvensional seperti radio lokal. Namun, keberhasilan komunikasi publik tidak semata-mata bergantung pada kecepatan dan kecanggihan media yang digunakan, melainkan juga pada kemampuan masyarakat dalam menerima, memahami, dan merespons informasi yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah narasumber dan pengamatan langsung di lapangan, diketahui bahwa hambatan utama yang dihadapi oleh Media Center bukan berasal dari kelemahan internal seperti minimnya konten atau keterbatasan teknis, melainkan lebih banyak disebabkan oleh tantangan eksternal. Hambatan tersebut muncul dari kondisi sosial dan budaya masyarakat yang sangat beragam, serta masih rendahnya tingkat literasi informasi dan digital di sebagian kelompok masyarakat. Rendahnya literasi informasi menyebabkan masyarakat sulit membedakan antara informasi resmi dan hoaks. Banyak warga belum terbiasa melakukan verifikasi informasi secara mandiri, terutama ketika menerima kabar melalui media sosial atau secara lisan.

Hal ini menyebabkan informasi tidak akurat mudah menyebar dan mengurangi efektivitas pesan yang disampaikan pemerintah. Muh Ilman Adzan, salah satu warga dari Kecamatan Sendana, menegaskan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar lebih selektif dalam menerima informasi: "Masyarakat perlu dikasih tahu pentingnya cek informasi langsung dari sumber resmi, supaya tidak hanya dengar dari orang lain yang kadang informasinya salah." Di sisi lain, masih kuatnya ketergantungan masyarakat terhadap komunikasi lisan dan media tradisional seperti radio juga menjadi kendala tersendiri. Meskipun Media Center telah memanfaatkan platform digital untuk menjangkau publik, sebagian masyarakat belum terbiasa menggali informasi sendiri

melalui media daring. Mereka lebih mempercayai kabar yang diperoleh langsung dari tetangga, tokoh masyarakat, atau kerabat, dibandingkan informasi dari kanal resmi pemerintah.

Selain faktor kebiasaan dan literasi, hambatan lain yang sangat signifikan adalah belum meratanya infrastruktur digital di wilayah Kabupaten Majene, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil. Akses internet yang lemah atau tidak stabil membuat sebagian masyarakat kesulitan mengakses website resmi maupun media sosial pemerintah. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan informasi, di mana masyarakat di wilayah kota lebih cepat dan mudah memperoleh informasi dibandingkan mereka yang berada di perbukitan atau pelosok desa.

Samad, Koordinator Peliputan Media Center Humas Kabupaten Majene, menjelaskan bahwa infrastruktur digital yang belum merata menjadi tantangan tersendiri: "Masalah jaringan itu juga sering muncul, apalagi kalau di wilayah pegunungan. Kadang-kadang informasi yang kami sebar lewat media sosial tidak sampai ke sana karena sinyal internetnya lemah. Makanya kami juga masih pakai radio sebagai alternatif." Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Media Center perlu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih adaptif dengan karakteristik lokal. Salah satunya adalah dengan memperkuat program edukasi literasi digital secara berkelanjutan yang melibatkan perangkat desa, komunitas lokal, dan memanfaatkan jalur informal seperti Posyandu, PKK, serta forum pertemuan warga.

Edukasi ini penting untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya mengakses informasi dari sumber resmi dan menggunakan media digital secara aktif, bijak, dan kritis. Dengan pendekatan yang bersifat kolaboratif dan kontekstual, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mampu menjadi bagian dari sistem komunikasi publik yang partisipatif dan bertanggung jawab. Hambatan-hambatan tersebut memang nyata, tetapi dengan komitmen dan inovasi, Media Center Humas Kabupaten Majene tetap memiliki potensi besar dalam membangun komunikasi publik yang efektif dan inklusif.

PEMBAHASAN

Media Center Humas Pemerintah Kabupaten Majene telah berperan secara aktif dan strategis dalam mendukung komunikasi publik melalui pendekatan digital dan konvensional yang responsif terhadap kondisi lokal. Penggunaan berbagai kanal digital seperti situs web resmi, media sosial (Facebook, Instagram, YouTube), serta sistem pengaduan SPAN LAPOR memperlihatkan komitmen dalam menyediakan informasi yang cepat, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kanal-kanal ini tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi satu arah, tetapi juga untuk membuka ruang dialog dan partisipasi masyarakat, sejalan dengan prinsip komunikasi publik partisipatif. Selain pendekatan digital, Media Center juga tetap mengoptimalkan media tradisional seperti radio lokal untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses internet.

Pendekatan ini mencerminkan strategi komunikasi yang inklusif dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Komitmen pemerintah daerah terlihat dari konsistensi penyajian informasi, baik terkait kebijakan, layanan publik, maupun pembangunan daerah. Jika dikaji dari perspektif teori komunikasi publik dan model *two-way symmetrical communication* dari Grunig dan Hunt, Media Center Majene telah menerapkan komunikasi dua arah yang seimbang antara pemerintah dan

masyarakat. Keterbukaan terhadap kritik, tanggapan terhadap keluhan, serta interaksi publik melalui forum pengaduan menjadi indikator bahwa pola komunikasi yang dibangun tidak hanya bersifat top-down, tetapi dialogis dan simetris. Peran Media Center bukan hanya sebagai penyampai informasi, melainkan juga sebagai fasilitator hubungan antara pemerintah dan warga secara konstruktif. Meski peran kelembagaan Media Center telah berjalan optimal, tantangan dalam komunikasi publik lebih banyak bersumber dari kondisi masyarakat sebagai penerima informasi.

Hambatan utama mencakup rendahnya literasi informasi dan digital, dominasi budaya komunikasi lisan, serta ketimpangan infrastruktur internet di daerah terpencil. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat belum mampu mengakses dan memanfaatkan kanal komunikasi digital yang telah disediakan secara maksimal. Dalam konteks teori komunikasi publik, keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh penyediaan informasi, tetapi juga oleh kesiapan audiens dalam menerima, memahami, dan merespons informasi tersebut. Pemerintah Majene telah memenuhi tiga pilar utama komunikasi publik: aksesibilitas, transparansi, dan partisipasi. Namun, masih diperlukan upaya lanjutan untuk meningkatkan kesadaran, keterampilan digital, dan partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi pemerintahan.

Dalam membandingkan dengan penelitian sebelumnya, pembahasan ini menempatkan Majene sebagai studi kasus yang memperkaya kajian komunikasi publik daerah. Jika penelitian di Badung menyoroti masalah internal kelembagaan, dan penelitian di Kalimantan Selatan menyoroti ketergantungan pada momentum isu, maka penelitian ini menyoroti pentingnya kesiapan masyarakat dalam menerima komunikasi, khususnya di daerah dengan keterbatasan digital. Dengan kata lain, Majene menjadi contoh bagaimana keberhasilan komunikasi publik tidak hanya bergantung pada kekuatan kelembagaan, tetapi juga pada kecocokan strategi dengan konteks sosial dan geografis masyarakatnya.

Penelitian ini memiliki nilai penting karena memberikan perspektif baru dalam studi komunikasi publik, terutama dari wilayah non Jawa yang seringkali kurang mendapat sorotan dalam kajian akademik. Dengan menempatkan audiens sebagai bagian integral dari efektivitas komunikasi, penelitian ini memperluas cakupan evaluasi kinerja humas pemerintah, dari yang sebelumnya hanya berorientasi pada struktur dan sistem, menjadi lebih kontekstual dan berbasis masyarakat. Temuan ini menjadi dasar yang kuat untuk merumuskan strategi komunikasi publik yang lebih adil, adaptif, dan berkelanjutan, terutama di daerah-daerah yang menghadapi tantangan geografis dan infrastruktur. Strategi berbasis komunitas, literasi digital, dan pemanfaatan media lokal menjadi elemen penting dalam membentuk komunikasi publik yang relevan dan efektif di masa mendatang.

KESIMPULAN

Media Center Humas Pemerintah Kabupaten Majene telah menjalankan fungsinya secara optimal sebagai media komunikasi publik dengan memanfaatkan berbagai platform digital dan konvensional, seperti media sosial, website resmi, SPAN LAPOR, serta radio lokal untuk menjangkau masyarakat secara luas dan merata. Upaya ini memperlihatkan komitmen dalam membangun keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Namun, efektivitas penyampaian informasi masih menghadapi

tantangan berupa rendahnya literasi informasi dan digital, ketergantungan pada komunikasi lisan, serta keterbatasan akses infrastruktur digital di beberapa wilayah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dan lebih proaktif dalam memanfaatkan kanal informasi resmi agar komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan lebih efektif, partisipatif, dan mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansar Suherman. 2020. *“Buku Ajar Teori-Teori Komunikasi”*. Yogyakarta, Cv. Budi Utama.
- Bakri, B., Unde, A.A., Bahfiarti, T. 2015. *“Media Center Sebagai Pusat Pelayanan Informasi Publik dalam Penyebarluasan Aktivitas Pemerintahan Kepada Masyarakat di Kabupaten Pinrang”*. Kareba: Jurnal Ilmu Komunikasi, 189-207.
- Cutlip, S. M., Broom, G. M., & Center, A. H. 2016. *“Effective Public Relations”*. Kencana.
- Hotniar Siringoringo. 2015. *“Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi”*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kriyantono, R. (2020). *Public relations: Konsep, strategi dan implementasi dalam dunia komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Clariska Putri Ayunda Tukan, Intan Mustafa, Viktor Ayestian Sedu. 2024. *“Peran Media Center Dalam Mendukung Komunikasi Dan Informasi Di Lokasi Pengungsian Erupsi Di Gunung Lewotobi”*. Jumas: Jurnal Masyarakat, e-ISSN : 2809-8676 Vol. 04 No. 01 Hal 105-110.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sarasati, Fitri, and Fitria Avicenna. 2021. *“Media Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan (Studi pada kasus COVID-19 di Indonesia).”* VISIONER : Jurnal Penelitian Komunikasi dan Informatika Vol. 3, No.1 327-332.
- Winardi. 2015. *“Manajemen Perilaku Organisasi”*. Jakarta: Prenada Media.